

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Landasan Teori

#### 1. Pengertian Toleransi antar umat Beragama

Secara bahasa atau etimologi toleransi berasal dari bahasa Arab *tasyamuh* yang artinya ampun, maaf dan lapang dada.<sup>1</sup> Dalam *Webster's World Dictionary of American Language* kata "toleransi" berasal dari bahasa Latin, *tolerare* yang berarti menahan, menanggung, membetahkan, membiarkan, dan tabah. Dalam bahasa Inggris, toleransi berasal dari kata *tolerance/tolerantion* yaitu Kesabaran, kelapangan dada, atau suatu sikap membiarkan, mengakui dan menghormati terhadap perbedaan orang lain, baik pada masalah pendapat (opinion), agama/kepercayaan maupun dalam segi ekonomi, sosial dan politik.

Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, toleransi adalah sifat atau sikap toleran, yaitu bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan kepercayaan, kebiasaan, kelakuan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri, misalnya toleransi agama (ideologi, ras, dan sebagainya).<sup>2</sup>

Menurut Sullivan, Pierson, dan Marcus, sebagaimana dikutip Saiful Mujani, toleransi didefinisikan sebagai a willingness to "put up with" those things one rejects or opposes, yang memiliki arti, kesediaan untuk menghargai, menerima, atau menghormati segala sesuatu yang ditolak atau ditentang oleh seseorang.<sup>3</sup>

Dadang Kahmad dalam buku Sosiologi Agama, mengupas tentang Kerukunan atau rukun merupakan harapan ideal setiap anak manusia, apapun agamanya.

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-munawir* (Yogyakarta: Balai pustaka Progresif, t.th), 1098

<sup>2</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1204

<sup>3</sup> Saiful Mujani, *Muslim demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 162

Hal ini dapat terwujud apabila konsep harmoni dalam interaksi sosial dan empati sosial terwujud. Harmoni interaksi sosial adalah terciptanya keselarasan sosial, manakala dalam bersesama, manusia mengedepankan sifat seimbang (*al-tawazun*) kaitannya dengan menerima informasi dari berbagai sumber. Maksudnya, tak laiah menghakimi salah, toleran (*al-tasamuh*) maksudnya memahami dan menghormati di tengah perbedaan, khususnya beda agama atau kepercayaan, dan adil (*al-adalah*) yakni bersikap tegas jika menjadi penguasa dalam menegakkan hukum. Empati sosial adalah kesadaran identitas sosial dalam meningkatkan kapasitas empati sebenarnya dapat dilakukan dengan lebih menambah kesadaran diri (*self aware autonomy*) dan mengurangi tendensi mengklaim apa yang benar dan apa yang salah, yang sering muncul dalam simbol agama yang dipahami secara subyektif.<sup>4</sup>

Menurut Franz Magniz Suseno, kerukunan berasal dari kata rukun yang diartikan “berada dalam keadaan selaras”, “tenang dan tentram”, “tanpa perselisihan dan pertentangan”. Adapun dapat dipahami juga, bahwa pengertian keadaan rukun merupakan suatu keberadaan semua pihak berada dalam keadaan damai satu sama lain, saling menerima dalam suasana tenang.<sup>5</sup>

Toleransi dalam maknanya, terdapat dua penafsiran tentang konsep ini, *Pertama*, penafsiran yang bersifat negatif yang menyatakan bahwa toleransi itu cukup mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain baik yang berbeda maupun yang sama. *Kedua* adalah yang bersifat positif yaitu menyatakan bahwa harus adanya bantuan dan dukungan terhadap keberadaan orang lain atau kelompok lain.<sup>8</sup>

Kemaslahatan umum dapat diwujudkan dengan agama. Agama telah menggariskan dua pola dasar

---

<sup>4</sup> Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 170.

<sup>5</sup> Franz Magniz Suseno, *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijakan Hidup Jawa*. (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2001), 39.

hubungan yang harus dilaksanakan oleh pemeluknya, yaitu hubungan secara vertikal dan hubungan secara horizontal. Pertama adalah hubungan antara pribadi dengan Khaliknya yang direalisasikan dalam bentuk ibadah sebagaimana yang telah digariskan oleh setiap agama. Hubungan ini dilaksanakan secara individual, tetapi lebih diutamakan secara kolektif atau berjamaah (shalat dalam Islam).

Pada hubungan pertama ini berlaku toleransi agama yang hanya terbatas dalam lingkungan atau intern suatu agama saja. kedua adalah hubungan antara manusia dengan sesamanya. Pada hubungan ini tidak hanya terbatas pada lingkungan suatu agama saja, tetapi juga berlaku kepada orang yang tidak seagama, yaitu dalam bentuk kerjasama dalam masalah-masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umum. Dalam hal seperti inilah berlaku toleransi dalam pergulan hidup antara umat beragama.<sup>6</sup>

## 2. Bentuk-bentuk Kerukunan

Pemerintah secara resmi menggunakan terminologi untuk konsep kerukunan hidup beragama mencakup tiga kerukunan, yang disebut dengan istilah “Trilogi Kerukunan” dalam perauran bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomer 9 tahun 2006/nomor 8 tahun 2006, kerukunan meliputi tiga aspek berikut:

### a. Kerukunan intern agama umat beragama

Hal lain yang perlu menjadi perhatian kaitanya dengan kerukunan intern umat beragama, yaitu kerukunan yang ada dalam satu agama. Hal ini dikarenakan dalam intern, sering terjadi pertentangan dan perpecahan. Dalam Agama Islam, terdapat ormas-ormas Islam, seperti NU, Persis, Muhammadiyah, dan lainnya. Di antara ormas-ormas itu sering terdapat perselisihan paham yang

---

<sup>6</sup> Said Agil Husain Al-Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 14

berdampak pada kebingungan umat dalam menjalankan keyakinannya.<sup>7</sup>

Menurut Alamsyah Ratu Perwiranegara, segala macam persoalan yang timbul dilingkungan intern umat beragama hendaknya dapat diselesaikan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, dan semangat kekeluargaan yang sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

Oleh karena itu, pembinaan kerukunan intern umat beragama perlu ditingkatkan agar tidak terjadi pertentangan antara pemuka agama dan umatnya, juga untung menghindari pertentangan yang bersifat doktriner.

b. Kerukunan di antara umat beragama

Kehidupan antarumat beragama telah diatur oleh peraturan pemerintah dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006/Nomor 8 tahun 2006 yang menyebutkan, antara umat beragama harus bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan UUD Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>8</sup> Sikap toleransi antarumat beragama dapat ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari melalui:

- a. Saling menghargai dan menghormati ajaran masing-masing agama.
- b. Menghormati atau tidak melecehkan simbol-simbol maupun kitab suci masing-masing agama.
- c. Tidak mengotori atau merusak tempat ibadah agama orang lain, serta ikut menjaga ketertiban dan ketenangan kegiatan keagamaan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang memeluk agama yang berbeda-beda pula. Sudah tentu

---

<sup>7</sup>Suparlan Syukur, *Studi Islam Transformatif: Pendekatan di Era Kelahiran Perkembangan dan Pemahaman Kontekstual*, 65.

<sup>8</sup>Adon Nasrullah Jamaludin, *Agama Konflik Sosial: Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme, dan Konflik Antarumat Beragama*, 97.

bahwa masing-masing agama tersebut mempunyai akidah sendiri-sendiri yang dalam beberapa hal tidak mungkin dapat dirumuskan menjadi satu. Kehadiran masing-masing agama telah berupaya menjawab tantangan kesejajarannya, yang pada akhirnya membuat agama-agama datang dengan pola pemahaman teologis yang berbeda. Karenanya kalau dibicarakan dari sudut teologinya tidak akan mungkin ditemui titik penyelesaiannya. Perbedaan itu tidak layak dipertentangkan dalam lingkup antar individu.<sup>9</sup>

c. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah

Pembinaan kerukunan antarumat beragama dan pemerintah perlu senantiasa digalakkan karena akan berpengaruh terhadap kehidupan beragama dan berbangsa. Semua pihak, baik umat beragama maupun pemerintah diharapkan dapat memahami posisi masing-masing. Dalam rangka pembinaan kehidupan beragama, pemerintah terhadap terwujudnya tiga prioritas nasional, yaitu pemantapan ideologi Pancasila, pemantapan stabilitas dan ketahanan nasional, serta suksesnya pembangunan nasional di segala bidang. Untuk itu, umat beragama diharapkan berpartisipasi aktif dan proaktif dalam usaha membudayakan Pancasila, memantapkan stabilitas dan ketahanan nasional, serta melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Kerjasama yang baik diantara umat beragama dengan pemerintah akan membuat kesinambungan yang saling menguntungkan. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah memiliki makna sebagai upaya menyosialisasikan dan menyinergikan kepentingan pemerintah dengan aspirasi umat beragama. Dengan demikian, terjadi hubungan timbal balik yang harmonis, yaitu pemerintah dapat melaksanakan berbagai program pembangunan atas dukungan umat beragama. Sementara umat beragama

---

<sup>9</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Agama Konflik Sosial: Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme, dan Konflik Antarumat Beragama*, 98.

mendapat fasilitas dari pemerintah. Dengan demikian, konflik agama dapat diatasi.<sup>10</sup>

### 3. Faktor Pendukung dan Penghambat Terjadinya Toleransi Antar Umat Beragama

#### a. Faktor pendukung

Toleransi, merupakan pandangan yang lebih positif karena mendorong usaha menahan diri untuk tidak mengancam atau merusak hubungan dengan orang beragama lain. Agama lain tidak dilihat sebagai ancaman, melainkan sebagai pandangan atau jalan hidup yang mengandung juga kebaikan dan kebenaran atau kebaikan itu, agama lain dibiarkan (latin :*tolerare*= membiarkan) hidup.<sup>11</sup>

Minimanya sebuah sikap toleran, maka rentang konflik agama. Pemikiran dan renungan secara kontinu mendesak dilakukan dengan menyusun Paradigma baru tentang hubungan umat beragama khususnya.<sup>12</sup>

Paradigma baru yang dimaksud bahwa hubungan antar agama memerlukan penantaan kembali, yakni melepaskan pemahaman religiusitas (keberagamaan) kita dari sejarah masa lalu. Semua agama hadir dalam berkembang di Tanah air. Inilah fakta yang sulit dibantah sejalan dengan itu, terminologi religiusitas berbeda dengan terminologi entitas- yang satu karena status yang diwarisi (*ascribed status*) dan satu lagi karena kedudukan yang diusahakan (*achieved status*). Antara religiusitas dengan terminologi negara bangsa (*nation-state*). Agama-agama memiliki jarak dengan negara, begitu juga sebaliknya.

---

<sup>10</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Agama Konflik Sosial: Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme, dan Konflik Antarumat Beragama*, 99.

<sup>11</sup> Th. Sumartana, dkk, *Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: DIAN/Interfidei, 2005), h.187

<sup>12</sup> Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama Merajut Kerukunan, Kesetaraan Gender, dan Demokratisasi dalam Masyarakat Multikultural* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, 2005), 200



Negara bertugas untuk memeberikan fasilitas bagi umat beragama agar dapat menjalankan fasilitas bagi umat beragama agar dapat menjalankan ajaran agamanya dnegan tekun dan tenang. Paradigma baru hubungan antar umat beragama dijabarkan sebagai berikut.

*Pertama*, kelangsungan hidup bangsa ini tidak hannya jadi tanggung jawab penganut agama tertentu, tetapi seluruh komponen bangsa Indonesia. Karna itu, kita perlu mengembangkan prinsip egaliter di tengah-tengah masyarakat.<sup>13</sup>

*Kedua*, masyarakat kita sebenarnya memiliki solidaritas tinggi untuk hidup rukun meski berebeda agama. Solidaritas ini merupakan peluang untuk mengamalkan ajaran agamanya masing-masing secara paripurna. Tetapi, solidaritas ini hancur manakala mereka hidup saling curiga. Ketika itu peluang melaksanakan ajaran -ajaran agama sangat kecil.<sup>14</sup>

*Ketiga*, Masyarakat sadar bahwa perbedaan tidak sama dengan permusuhan. Perbedaan ini jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan masyarakat yang homongen tapi tidak menyadari kelebihan dan kekurangan masing-masing.<sup>15</sup>

*Keempat*, umat beragama sadar bahwa kebenaran setiap agama memiliki makna universal dan memiliki dimensi kemausiaan. Oleh karena itu, eksistensi agama tidak ditentukan oleh kekuatan politikbirokratis, tetapi kontribusi terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan. Semakin besar subangan kemanusiaan suatu agama, amaka

---

<sup>13</sup> Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama Merajut Kerukunan, Kesetaran Gender, dan Demokratisasi dalam Masyarakat Multikultural*, 205

<sup>14</sup> Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama Merajut Kerukunan, Kesetaran Gender, dan Demokratisasi dalam Masyarakat Multikultural*, 206

<sup>15</sup> Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama Merajut Kerukunan, Kesetaran Gender, dan Demokratisasi dalam Masyarakat Multikultural*, 206

semakin besar pula perkembangan kemanusiaan di masa depan.<sup>16</sup>

Tanda bahwa ada sikap dan suasana toleransi di antara sesama manusia, atau katakanlah di antara pemeluk agama yang berbeda ialah dapat dilihat dari segi-segi dibawah ini:<sup>17</sup>

1) Mengakui hak setiap orang

Suatu sikap mental yang mengakui hak setiap orang di dalam menentukan sikap-laku dan nasibnya masing-masing. Tentu sikap atau perilaku yang dijalankan itu tidak melanggar hak setiap orang lain, karena kalau demikian, kehidupan di dalam masyarakat akan kacau

2) Menghormati keyakinan orang lain

Keyakinan agama, tidak boleh adanya pemaksaan untuk mengikuti golongan agama tertentu. Orang yang memaksakan keyakinan, apalagi dengan jalan kekerasan atau teror atau dengan siasat bujuk rayu, baik halus atau kasar tidak dibenarkan. Bilan seseorang tidak menghormati keyakinan orang lain, artinya soal perbedaan agama, perbedaan keyakinan dan perbedaan pandangan hidup akan menjadi bahan ejekan atau bahan cemoohan dianantara satu orang dengan lainnya.

3) Agree in Disagreement

“Agree in Disagreement” (setuju di dalam perbedaan) adalah prinsip yang selalu digunakan oleh Menteri Agama Prof. Dr. H. Mukti Ali. Perbedaan tidak harus ada permusuhan, karena perbedaan selalu ada didunia ini, dan perbedaan harus menimbulkan pertentangan.

---

<sup>16</sup> Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama Merajut Kerukunan, Kesetaran Gender, dan Demokratisasi dalam Masyarakat Multikultural*, 206

<sup>17</sup> Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama* (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), 23-25.



4) Saling mengerti

Tidak akan terjadi saling menghormati antara sesama orang bila mereka tidak saling menegerti. Saling anti dan saling membenci, saling berebut pengaruh adalah salah satu akibat dari tidak adanya saling menegrti dan saling menghargai antara satu dengan yang lain.

5) Kesadaran dan kejujuran

Toleransi menyangkut sikap dan jiwa dalam kesadaran batin seseorang. Kesadaran jiwa menimbulkan kejujuran dan kepolosan sikap-laku. Oleh sebab itu, apabila sikap tersebut sudah pada tingkat demikian, maka masyarakat akan tertib dan tenang, hal ini bila toleransi sudah dianggap sebagai salah satu dasarnya.

6) Jiwa Falsafah Pancasila

Falsafah Pancasila telah menjamin adanya ketertiban dan kerukunan hidup bermasyarakat. Dan bila falsafah Pancasila ini disebutkan yang terakhir, itu bukan sebagai urutan yang terakhir dari segi-segi toleransi, tetapi falsafah Pancasila itu merupakan landasan yang telah diterima oleh segenap masyarakat Indonesia, merupakan konsensus dan diterima praktis oleh bangsa Indonesia, atau lebih dari itu, adalah merupakan dasar negara kita.

**b. Faktor penghambat**

Perkembangan agama-agama di negeri ini tidak terlepas masalah politik. Masuknya Hindu dan Budha, misalnya, menimbulkan dampak terancamnya pranata sosial lama yang terbentuk melalui kepercayaan animisme dan dinamisme. Demikian juga, ketika Islam masuk dan berkembang di nusantara menimbulkan reaksi dari penganut agama-agama sebelumnya.

Kesan politis ini terasa lebih kentara ketika masuk dan berkembangnya agama Kristen. Hal ini

tentu karena masuknya Kristen bersamaan dengan era penjajah barat ke Indonesia. Kondisi ini diperkuat dengan semangat yang lebih dari sebagaimana missionaris dalam melakukan proses penginjilan. Anehnya, umat Islam menyikapi dengan depensif bahkan terkesan apolegetik. Paradigma hubungan antar umat beragama dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>18</sup>

*Pertama*, kebenaran suatu agama hanya bagi penganutnya atau yang satu paham dengannya, sementara penganut agama lain salah. Akibatnya, pemahaman tentang keberagaman menjadi sempit.

*Kedua*, kaburnya batas religiusitas dengan entitas. Artinya, tingkat keberagaman hanya ditentukan oleh faktor eksternal, orang yang memberikan pemahaman keagamaan. Akibatnya monopoli entitas dan agama tertentu tak dapat dihindari. Kondisi inilah yang membuat perlawanan dari etnis dan agama lain.

*Ketiga*, saling curiga. Pada prinsipnya, saling curiga bisa bersumber dari persepsi orang-orang beragama tentang hubungan dengan warga masyarakat bersama agama lain. Oleh karena itu, semakin sempit pandangan dan negatif itu, semakin besar pula rasa saling curiga yang muncul terhadap orang-orang beragama lain.<sup>19</sup>

*Keempat*, terminologi mayoritas dan minoritas. Di kalangan penganut agama terminologi selalu dikaitkan dengan superioritas dan inferioritas. Akibatnya, kelompok masing-masing penganut agama merasa lebih unggul dari pada yang lain. Lebih jauh lagi, sebagian kelompok agama merasa kurang memperoleh pelayanan baik dari birokrasi. Oleh karena itu, terminologi mayoritas-minoritas dipahami sebatas pengadaian statistik semata.

---

<sup>18</sup>Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama Merajut Kerukunan, Kesetaran Gender, dan Demokratisasi dalam Masyarakat Multikultural*, 198-199

<sup>19</sup>Th. Sumartana, dkk, *Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia*, 139

*Kelima*, kebebasan menyampaikan pesan agama. Atas nama hak asasi manusia, maka suatu kelompok agama merasa memiliki kebebasan untuk menyampaikan ajaran agama pada orang lain

*Keenam*, sebagian kelompok berpandangan bahwa kriteria mendirikan rumah ibadah lebih ditentukan oleh peluang internal kelompoknya, sementara sebagian kelompok lagi berpandangan bahwa kriteria itu harus memberikan mempertimbangan kondisi eksternal, yaitu sensitifikasi dari masyarakat. Akibatnya, sebagian merasa dipersulit dalam mendirikan rumah ibadah dan bahkan lagi merasa adanya ancaman keharmonisan sosial dengan berdirinya rumah ibadah di tempat tertentu

*Ketujuh*, tidak menyukai cara beragama. Sebagian kelompok agama menilai bahwa kelompok agama lain bersemangat dalam upacara-upacara keagamaan sehingga mengusik ketenangan, sementara ada kelompok bahwa sekelompok agama tertentu seringkali memertontonkan perilaku tidak agamis seperti makan makanan yang haram

Pandangan paling sempit, hubungan antarumat beragama dilihat dari sebagai *relasi-konflik*. Orang-orang beragama lain dilihat secara negatif. Mereka merupakan problem dan ancaman, dan karena itu perlu diselesaikan.

#### 4. Interaksi Sosial

##### a. Pengertian Interaksi

Interaksi berasal dari kata bahasa Inggris (*interaction*) yang berarti pengaruh timbal balik atau proses saling mempengaruhi. Interaksi merupakan dinamika kehidupan manusia, baik secara individu maupun kelompok dalam masyarakat. Dengan kata lain, interaksi berarti suatu rangkaian tingkah laku yang terjadi antara dua orang atau lebih yang mengadakan respons secara timbal balik.

##### b. Bentuk-bentuk Interaksi Sosial

Adapun pembahasan tentang bentuk-bentuk interaksi sosial merujuk pada teori Soejono Soekanto

dalam tulisannya, membagi proses terjadinya interaksi dalam dua bagian, yaitu pola hubungan asosiatif meliputi kerja sama (cooperation) dan akomodasi (accommodation) atau sebuah upaya untuk meredakan pertentangan dengan cara mengurangi tuntutan-tuntutan.<sup>20</sup>

Sementara itu, menurut Harun Nasution agama berasal dari kata sankrit yang tersusun dari dua kata, yaitu 'a' yang berarti tidak, dan 'gam' yang berarti pergi.<sup>21</sup> Menurut Sir. Dr. Mohammad Iqbal, agama merupakan suatu pernyataan utuh dari manusia. Dengan demikian, agama dapat diartikan sebagai sebuah tuntunan dan pedoman bagi manusia agar tetap berada pada fitrah penciptaannya. Agama melalui ajaran-ajarannya menjadi pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan, baik hubungannya dengan sesama manusia maupun hubungan dengan pencipta-Nya. Perilaku umat beragama di mana pun ada faktor yang andil sebagai modal berperilaku, diantaranya ajaran, fatwa lembaga tinggi agama, pesan leluhur agama, dan kisah hidup umat beragama dalam beragama, karena dalam ajaran agama manapun tentunya mengajak kepada kebaikan.<sup>22</sup>

Sehubungan dengan kerangka teori yang digunakan dalam membantu penulisan hasil penelitian di lapangan, penulis menggunakan kerangka teori integrasi struktural fungsional yang diperkenalkan Talcot Parson, “dalam teori tersebut, ditekankan kepada keteraturan, mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Salah satu dari konsep-konsep utamanya tentang keseimbangan (*equilibrium*).”

---

<sup>20</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), 76.

<sup>21</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 2001), 04.

<sup>22</sup> Irzum Farihah, “Agama Menurut Ibnu Khaldun”, *Jurnal Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, vol. 02, no. 01 (2014), 187.

Menurut teori integrasi struktural fungsional, masyarakat yang ada dalam kondisi statis atau lebih tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan, selalu melihat bahwa anggota masyarakat terikat secara informal oleh norma-norma, nilai-nilai, dan moralitas umum. Dalam teori struktural fungsional ini juga diterangkan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian atau elemen yang saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya jika tidak fungsional, maka struktur ini tidak akan ada.

Teori fungsionalisme structural Parsons dimulai dengan empat fungsi penting untuk semua sistem “tindakan”, terkenal dengan sekema AGIL. AGIL, suatu fungsi adalah kumpulan kegiatan yang ditujukan kearah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Dengan menggunakan definisi ini, Parsons yakin bahwa ada empat fungsi penting yang diperlukan semua sistem yaitu *adaptation, goal attainment, integration, dan latensi*. Secara bersama-sama, keempat imperative fungsional ini di kenal sebagai skema AGIL. Agar tetap bertahan, suatu sistem harus memiliki empat fungsi ini:

- 1) *Adaptation* (adaptasi) yaitu sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal atau lingkungannya. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
- 2) *Goal attainment* (pencapaian tujuan) yaitu sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
- 3) *Integration* yaitu sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya.
- 4) *latensi* (pemeliharaan pola) yaitu sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaiki,

baik motifasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motifasi.<sup>23</sup>

Teori structural fungsional, Parsons juga mengatakan adanya beberapa struktural institusional fungsional dalam mekanisme untuk memenuhi persyaratan fungsional yang di berikan sehingga mencapai hasil sebuah identifikasi tipe structural tertentu yang ada di dalam masyarakat. Parsons dalam hal ini menunjukkan ada empat struktur di antaranya yaitu:

- a. Struktur kekerabatan. Struktur ini berhubungan dengan pengaturan ungkapan pemeliharaan, dan pendidikan anak usia muda.
- b. Struktur prestasi instrumental dan stratifikasi. Struktur ini menyalurkan semangat dorongan individu dalam memenuhi tugas yang perlu untuk mempertahankan kesejahteraan masyarakat keseluruhan sesuai dengan nilai-nilai yang di anut bersama.
- c. Teritorialitas, kekuasaan, dan integrasi dalam sistem kekuasaan. Semua masyarakat harus memiliki suatu bentuk organisasi territorial. Hal ini perlu untuk mengontrol konflik internal dan untuk berhubungan dengan masyarakat lainnya, atau masyarakat memiliki suatu bentuk organisasi politik.
- d. Agama dan integritas nilai. Pentingnya nilai-nilai yang di anut bersama sudah sering kali ditekankan. Masalah membatasi nilai dan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai itu sangat erat hubungannya dengan institusi agama. Secara tradisional, agama memberikan krangka arti simbolis yang bersifat umum karenanya nilai dalam masyarakat memperoleh makna akhir.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern Edisi Keenam*. (Jakarta: Kencana, 2004), 121.

<sup>24</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern Edisi Keenam*, 125.



Dalam teori ini Talcott Parson menyatakan bahwa suatu keadaan teratur itu disebut “masyarakat”. Dengan mengingat bahwa masyarakat terdiri dari individu yang berbeda, maka timbul pertanyaan “Bagaimana orde (keseimbangan) itu mungkin?. Apa yang melatar belakangi kesatuan masyarakat?”. Oleh karena itu, ia menyusun sebab-sebab yang melatar belakangi perpaduan masyarakat tersebut disebabkan oleh:

- a. Adanya nilai-nilai budaya yang dibagi bersama.
- b. Yang dikembangkan menjadi norma-norma sosial.
- c. Dibatinkan oleh individu-individu menjadi motivasi-motivasinya.

Teori struktural fungsional Parsons, memandang bahwa masyarakat sebagai bagian dari suatu lembaga sosial yang berada dalam keseimbangan, yang mempolakan kegiatan manusia berdasarkan norma-norma yang dianut bersama serta dianggap sah dan mengikat peran serta manusia itu sendiri.

Integrasi masyarakat akan terwujud apabila mampu mengendalikan prasangka yang ada di masyarakat sehingga tidak terjadi konflik, dominasi, tidak banyak sistem yang tidak saling melengkapi, dan tumbuh integrasi tanpa paksaan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan integrasi pada masyarakat majemuk dilakukan dengan mengatasi prasangka.

Hal yang penting dalam mengatasi dimensi kemajemukan suatu masyarakat dapat dilakukan dengan melihat jumlah kelompok yang berbeda kebudayaan, konsensus anggota-anggota masyarakat terhadap nilai yang mengikat seluruh warga masyarakat, dan mudah tidaknya individu pindah dari suatu kelompok ke kelompok lainnya.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Moenandar Soelaiman, *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. (Bandung: PT. Eresco, 1995), 240.

## 5. Toleransi dalam Sudut pandang Teologi Islam dan Kristen

### a. Toleransi dalam sudut pandangan Teologi Islam

Secara etimologi aqidah berasal dari kata *aqada*, *ya'qadu*, *aqdan*, *aqidatan* yang berarti ikatan, perjanjian, dan kokoh.<sup>26</sup> Aqidah secara terminologis adalah kepercayaan kepada suatu hakekat tertentu dengan kepercayaan yang mutlak, yang tidak mengandung keraguan dan perdebatan.<sup>27</sup>

Sedangkan Ibnu Taimiyah menyatakan aqidah merupakan suatu perkara yang harus dibenarkan dalam hati, dengannya jiwa menjadi tenang, sehingga jiwa itu menjadi yakin dan mantap tidak dipengaruhi oleh keraguan dan juga tidak dipengaruhi oleh syakwasangka. Selanjutnya Hasan al-Bana menyebutkan bahwa aqidah sebagai sesuatu yang mengharuskan hati membenarkannya, membuat ketenangan dan ketentraman jiwa yang menjadikan kepercayaan bersih dari berbagai keraguan dan kebingungan.

Berdasarkan dua pengertian tersebut, Muhaimin, dkk. Menggambarkan aqidah dalam Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Aqidah berdasarkan pada keyakinan hati, tidak menuntut yang serba rasional sebab terdapat banyak masalah yang justru tidak rasional dalam masalah aqidah.
- 2) Aqidah Islam sesuai dengan fitrah manusia sehingga pelaksanaan aqidah menimbulkan ketentraman dan ketenangan.
- 3) Aqidah Islam diasumsikan sebagai perjanjian yang kokoh, maka dalam pelaksanaan aqidah harus penuh keyakinan tanpa disertai kebingungan dan keraguan.

---

<sup>26</sup> Dede Ahmad Ghazali dan Heri Gunawan, *Studi Islam Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Interdisipliner* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 151.

<sup>27</sup> abdu Al-Ghoniyy Abud, *Aqidah Islam VS Ideologi Modern* (Ponorogo: Trimurti Press, 1992), 1.

- 4) Aqidah dalam Islam tidak hanya diyakini, perlu pengucapan dengan kalimah *tayyibah* dan diamalkan dengan perilaku/perbuatan yang saleh.
- 5) Keyakinan dalam aqidah Islam merupakan masalah yang supra empiris, maka dalil yang digunakan dalam pencarian kebenaran tidak hanya didasarkan atas indra dan kemampuan manusia melainkan membutuhkan wahyu yang dibawa oleh para Rasul Allah Swt.<sup>28</sup>

Toleransi diantara manusia, diajarkan juga oleh Islam, bahkan Toleransi termasuk ajaran yang sangat prinsip. Hal ini dapat dipahami dari misi Agama Islam itu sendiri, yang mana Islam itu sendiri bermakna damai, yaitu damai dengan sesama manusia dan malah dengan makhluk lainnya. Dengan demikian ajaran toleransi, sudah terkandung dalam penamaan Islam itu sendiri.

Sedangkan pandangan Islam terhadap agama lain sangat positif dan sangat konstruktif. Hal ini dapat dilihat dari nilai dan ajarannya yang memberikan peluang dan mendorong kepada umat Islam untuk dapat melakukan interaksi sosial, kerjasama dengan mereka.<sup>29</sup>

Berlaku baik dengan sesama manusia memang sangat dianjurkan dalam Islam. Begitu pula halnya dalam menyebarkan Agama. Islam jauh-jauh sudah mengingatkan agar jangan memaksakan keyakinan atau agamanya kepada orang lain, sebagaimana Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 256 :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ  
فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ

<sup>28</sup> Ghazali dan Gunawan, *Studi Islam Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Interdisipliner*, 152.

<sup>29</sup> H. AH. Choiron, *perbandingan Agama (kajian Agama dalam Perspektif Komparatif)*, (Kudus, STAIN KUDUS, 2009), 188.

أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S: Al-Baqarah: 256)

Adapun yang dimaksud *Thaghut* dalam ayat diatas ialah syaitan apa saja yang disembah selain dari Allah SWT.

Menurut riwayat Ibnu Abbas, *asbabun nuzul* ayat diatas berkenaan dengan Hushain dari golongan Anshar, suku Bani Asalim yang mempunyai dua orang anak yang beragama Nasrani, sedang dia sendiri beragama Islam. Ia bertanya kepada nabi Muhammad SAW : Bolehkah saya paksa kedua anak itu, karena mereka tidak taat kepadaku dan tetap ingin beragama Narani, Allah menjelaskan jawabannya dengan ayat diatas, bahwa tidak ada paksaan dalam Islam.

Islam merupakan agama dakwah yaitu agama yang menegaskan umatnya untuk menyebarkan dan menegaskan umatnya unuk menyebarkan Islam dan menyiarkan kepada seluruh umat manusia secara arif dan bijaksana sebagai agama yang rahmat *alil alamin* Islam dapat menjamin akan terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan umat manakala ajaran Islam yang dilaksanakan dengan ungguh-sungguh dan benar

sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>30</sup>

Diatas realitas sosial Madinah seperti sebelumnya, Nabi Muhammad SAW melahirkan piagam Madinah atau perjanjian antargolongan yang memperkenalkan ide-ide yang sangat revolusioner, etis, dan anggun, yang mempunyai tujuan strategis bagi terciptanya suatu keserasian politik dengan mengembangkan toleransi sosioreligius dan budaya yang seluas-luasnya. Bila analisis tentang tujuan ini lebih dipertajam lagi, maka tujuan ideal yang hendak dicapai sebenarnya adalah terciptanya suatu tata sosiopolitik yang ditegakkan atas landasan iman dan moral, tetapi dengan menjamin hak kebebasan setiap golongan untuk mengembangkan pola-pola budaya yang mereka pilih sesuai keyakinan mereka masing-masing.<sup>31</sup>

Pemaksaan dalam bentuk apapun agar orang lain beriman sesuai dengan agama yang memaksa adalah tindakan tidak etis dan bertentangan dengan kemauan atau kehendak Allah. Ada beberapa ayat yang dapat menuntut umat Islam untuk mengembangkan konsep kerukunan antara sesama umat manusia, misalnya :

Surat Al-Hujurat ayat 13 :

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ  
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan*

<sup>30</sup>Jamal Ghofir, *Piagam Madinah*, (Yogyakarta, Aura Pustaka, 2012), 1.

<sup>31</sup>Syahrin Harahap, *Teologi Kerukunan*, (Jakarta, Prenada, 2011), 40.

*kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al Hujuraat:13)*

Selain penjelasan dari Al-Quran masalah kerukunan juga ditemui dalam hadits. Hal ini dapat dilihat dalam perilaku nabi sehari-hari dalam bergaul dengan pemeluk Agama lain.

Diantara contoh perbuatan nabi yang berkaitan dengan toleransi, misalnya pada suatu ketika datang menghadap beliau di Madinah beberapa orang delegasi Kristen dari Najran yang diketahui seorang pendeta besar. Delegasi itu beliau sambut dengan cara yang hormat. Beliau buka jubahnya dan dibentangkan di lantai untuk tempat duduk para tamunta itu, sehingga mereka kagum terhadap penerimaan yang luar biasa sopannya. Kemudian ketika datang waktu sembahyang mereka, sedang gereja tidak ada di Madinah, maka Nabi mempersilahkan Masjid Madinah menurut cara sembahyang mereka.<sup>32</sup>

Dengan demikian semakin jelaslah ajaran kerukunan dalam Islam, dan ajaran tersebut pada dasarnya bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasul. Begitu komprehensifnya ajaran Islam sehingga bagaimana membina hubungan yang harmonis antara sesama manusia sehingga terjadi ketertiban dalam kancah kehidupan ini.<sup>33</sup>

#### **b. Toleransi dalam Agama Kristen**

Dalam ajaranagama Katholik juga ditemui konsep tentang Toleransi, hal ini sebagaimana

---

<sup>32</sup>Nurcholis Madjid, *Fiqih Lintas Agama*, (Jakarta, Paramadina, 2004), 26.

<sup>33</sup>Jirhanuddin, *Perbandingan Agama*, 198.



tercantum dalam Deklarasi Konsili Vatikan II tentang sikap Gereja terhadap Agama-Agama lain di dasarkan pada asal kisah rasul-rasul 17:26 sebagai berikut : Adapun segala bangsa itu merupakan satu masyarakat dan asalnya pun satu juga, karena Tuhan menjadikan seluruh bangsa manusia untuk menghuni seluruh bumi.

Hendaklah diingat bahwa memang ada bagian sejarah kekristenan yang penuh noda (perang salib dan perang antar agama kristen di Eropa). Namun haruslah diakui bahwa kekristenan mempunyai landasan teologia yang solid tentang toleransi beragama. Hal tersebut terbukti dengan adanya paham kekristenan tentang kesaksian.

Agar toleransi yang benar terjadi, hendaknya kita menghindari klaim bahwa kita mempunyai kebenaran. Ini berarti pula kita tidak bersaksi tentang superioritas agama kristen terhadap agama-agama lain, tetapi bersaksi tentang kristus yang telah mati dan bangkit bagi semua orang. Dengan demikian orang-orang kristen bersama –sama dengan orang lain bekerja sama untuk memelihara ketertiban dan perdamaian dalam kasih setia yang tidak bersyarat serta tidak terjerumus ke dalam sikap keagamaan yang legalistik. Sikap legalistik adalah sikap menghakimi orang lain.<sup>34</sup>

Dalam bagian lain dari Mukadimah Deklarasi tersebut disebutkan : Dalam Zaman kita ini, dimana bangsa manusia makin hari makin erat bersatu, hubungan antara bangsa menjadi kokoh, gereja lebih seksama memepertimbangkan bagaimana hubungannya dengan Agama-agama Kristen lain. Karena tugasnya memelihara persatuan dan perdamaian diantara manusia dan juga diantara para bangsa, maka di dalam deklarasi ini gereja mempertimbangkan secara istimewa apakah kesamaan manusia dan apa yang menarik mereka untuk berkawan.<sup>35</sup>

Deklarasi Konsili Vatikan II di atas berpegang teguh pada hukum yang paling utama yakni “

---

<sup>34</sup>Said Agil Husain Al Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, 17.

<sup>35</sup>Nurcholis Madjid, *Fiqih Lintas Agama*, 30.

Kasihaniilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap hal budimu dan dengan segenap kekuatanmu dan kasihaniilah sesama manusia seperti dirimu sendiri.”

Isi deklarasi diatas menggambarkan bagaimana bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki hak yang sama, tidak boleh membeda-bedakannya mesti mereka berlainan Agama. Sikap saling menghormati agar kehidupan menjadi rukun sangat dianjurkan.

## **B. Penelitian Terdahulu**

1. Berdasarkan hasil skripsi yang disusun oleh Dina Juz Hayya yang berjudul Kerukunan Antar Umat Islam dan Kristen di Desa Bondo Jepara (Kajian Tentang Toleransi Beragama) tahun 2018 bahwa keadaan keagamaan di Desa Bondo Jepara adalah plural terbukti dengan jumlah warga yang setengahnya menganut agama Islam dan setengahnya lagi beragama Kristen protestan. Meskipun demikian mereka mempunyai sikap saling membantu dan berbaaur satu sama lain. Bentuk-bentuk toleransi antar umat Islam dan Kristen diantaranya adalah kegiatan bersama, Hal ini dapat kita lihat, dengan adanya kegiatan gotong royong dalam hal kerja bakti, pembangunan rumah, kebersihan desa, saling menjaga keamanan saat hari besar agama, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Sedangkan faktor pendorong dan penghambat kerukunan antar umat beragama disana diantaranya adalah ajaran agama yang dianut dan diyakini oleh setiap umatnya masing-masing faktor lainnya adalah karena masih ada hubungan persaudaraan antara warga. Adapun faktor penghambat yaitu adanya pendatang baru yang belum terbiasa dengan keadaan Desa Bondo yang saling berbaaur menjadi satu saling membantu walaupun beda agama serta adanya pernikahan beda agama di Desa Bondo juga termasuk

salah satu faktor yang menghambat kerukunan antar umat beragama di Desa Bondo tersebut.<sup>36</sup>

Bedanya dengan fokus penelitian saya yaitu tingkat harmonisasi yang ada pada masyarakat dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kerukunan umat beragama di Desa Tempur.

2. Skripsi yang berjudul “Toleransi Beragama di Komplek Pecinan Pati Jl. Setiobudi no 9 Kelurahan Pati Wetan, Kecamatan Pati Kota (Studi kasus Islam, Kristen, dan Konghucu) dalam skripsi ini dibahas tentang toleransi beragama ditengah-tengah masyarakat, yang plural disini dijelaskan bahwa dikomplek pecinan tersebut terdapat banyak pendatang dari cina yang menganut agama Konghucu, pada komplek pecinan tersebut Konghucu menjadi agama mayoritas, setiap tahunya diadakan kegiatan Implek. Meskipun demikian, dari keadaan tersebut bisa tercipta tali kerukunan antar pemeluk agama tanpa memandang, suku, ras , dan agama. Karena dari masing-masing umat beragama saling kuat untuk menanamkan nilai-nilai toleransi.<sup>37</sup> Seperti halnya yang terjadi di desa Tempur ketika ada kegiatan/hari besar dari agama masing-masing mereka saling tolong menolong dan membantu meski berbeda agama.
3. Skripsi Ja’far Luthfi, Model Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi Inkulturasi Antara Umat Kristen Dan Islam Di Desa Nawangsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal), Di desa Nawangsari faktor budaya menjadi hal yang sangat penting peranya dalam berperan terhadap kerukunan disana, sehingga inkulturasi kebudayaan menjadi hal yang menonjol sebagai model kerukunan di desa Nawangsari ini. Adapun fator pendukung terjadinya kerukunan di desa Nawangsari adalah: 1) ajaran agama 2) peran tokoh agama 3) inkulturasi budaya 4) sikap kekeluargaan 5) pemukiman yang heterogen 6)

---

<sup>36</sup> Dina Juz Hayya, “Kerukunan Antar Umat Islam dan Kristen di Desa Bondo Jepara (Kajian Tentang Toleransi Beragama)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, 2018).

<sup>37</sup>Parti Muktia, “Toleransi beragama dikomplek Pecinan Jl. Setiobudi no.9 Kelurahan Pati wetan, Kecamatan Kota Pati (Studi Kasus Islam, Kristen, dan Konghucu)” (Skripsi, STAIN, Kudus, 2017)

perekonomian dan pendidikan yang baik. Adapun penghambatnya adalah: 1) pemahaman agama yang dangkal 2) kurangnya pemahaman pentingnya kerukunan umat beragama 3) pemerintah yang kurang aktif.<sup>38</sup>

### C. Kerangka Berfikir

Kerukunan hidup beragama ialah terjadinya hubungan yang baik antara penganut agama yang satu dengan lainnya dalam suatu pergaulan kehidupan beragama. Dengan cara saling memelihara, saling menjaga serta saling menghindari hal-hal yang menimbulkan kerugian atau menyinggung perasaan.

Dalam pengertian sehari-hari rukun dan kerukunan adalah damai dan kedamaian. Dengan pengertian ini jelaslah bahwa kata kerukunan hanya digunakan dan berlaku pada dunia pergaulan. Dengan kerukunan dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga yang berlainan agama. Urgensi kerukunan adalah untuk mewujudkan kesatuan pandangan yang membutuhkan kesatuan sikap, guna melahirkan kesatuan perbuatan dan tindakan. Sedangkan kesatuan perbuatan dan tindakan menanamkan rasa tanggung jawab bersama umat beragama. Sehingga tidak ada pihak yang melepaskan diri dari tanggung jawab dan menyalahkan orang lain.

---

<sup>38</sup> Ja'far Luthfi, "Model Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi Inkulturasi Antara Umat Kristen Dan Islam Di Desa Nawangsari Kecamatan Waleri Kabupaten Kendal)" (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang 2017)

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

